



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.2068, 2014

KEMENDAGRI. Rencana Kerja. 2015.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 102 TAHUN 2014  
TENTANG  
RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015, perlu menyusun Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 91);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
  10. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 91);

11. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334);
12. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja, yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan tahunan Kementerian/Lembaga.
2. Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Renja Kementerian Dalam Negeri adalah dokumen perencanaan Kementerian Dalam Negeri tahun 2015.
3. Rencana Kerja Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Renja Satker adalah dokumen perencanaan Unit Eselon I lingkup Kementerian Dalam Negeri tahun 2015.
4. Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut satker, adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program Kementerian Dalam Negeri serta memiliki kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran.
5. Kepala Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Kepala Satker, adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program yang dibiayai dari DIPA pada Satuan Kerja.
6. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP, adalah dokumen perencanaan nasional tahun 2015.
7. Program adalah penjabaran kebijakan sesuai visi dan misi Kementerian/Lembaga yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur.

8. Kegiatan adalah penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon II/Satker atau penugasan tertentu Kementerian/Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja terukur.
9. Indikator Kinerja Kegiatan, yang selanjutnya disebut IKK, adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan.
10. Target adalah satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut RKA K/L adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri tahun 2015.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, yang selanjutnya disebut APBNP, adalah perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara pada tahun berjalan.

#### Pasal 2

Renja terdiri atas:

- a. Renja Kementerian Dalam Negeri;
- b. Renja Satker.

#### Pasal 3

- (1) Renja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, memuat:
  - a. Arah Kebijakan dan Strategi;
  - b. Program;
  - c. Indikator dan Target Kinerja Program;
  - d. Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Kegiatan; dan
  - e. Alokasi Anggaran.
- (2) Renja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

- (1) Renja Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, memuat:
  - a. Arah Kebijakan dan Strategi Satker;
  - b. Program Satker;
  - c. Indikator dan Target Kinerja Program Satker;

- d. Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Kegiatan Satker;
  - e. Alokasi Anggaran Satker; dan
  - f. Komponen Input Satker.
- (2) Renja Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Satker atas nama Menteri.

#### Pasal 5

- (1) Renja Kementerian Dalam Negeri dan Renja Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dijabarkan lebih rinci dalam dokumen RKA K/L; dan
- (2) Kepala Satker menyampaikan laporan pelaksanaan atas Renja dan RKA-K/L kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2014  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

## LAMPIRAN

## PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR 102 TAHUN 2014

## TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015

RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
TAHUN ANGGARAN 2015

## I. VISI

“Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

## II. MISI

1. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
3. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta
6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

## III. TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS

1. Memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat, dengan sasaran strategis:
  - a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu/Pilpres);
  - b. Meningkatnya Komitmen Pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan; dan
  - d. Meningkatnya kesadaran Warga Negara dalam partisipasi Politik.
2. Meningkatkan sinergitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, dengan sasaran strategis:

- a. Meningkatnya dukungan reformasi di bidang pelayanan umum;
  - b. Meningkatnya pelaksanaan kerjasama antar daerah dan pembinaan wilayah dalam rangka harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan;
  - c. Meningkatnya pengembangan wilayah perbatasan antar negara;
  - d. Meningkatnya penataan wilayah administrasi, penegasan batas antar daerah, dan toponimi;
  - e. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan aparat Satpol PP dan Satlinmas;
  - f. Meningkatnya pengembangan kawasan khusus di daerah; dan
  - g. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sarana-prasarana pemerintahan pasca bencana/pengurangan resiko bencana;
3. Terciptanya tertib administrasi kependudukan, dengan sasaran strategis:
- a. Tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan;
  - b. Terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk;
  - c. Terciptanya koneksitas NIK dengan identitas kependudukan;
  - d. Tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan;
  - e. Terwujudnya Perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan; dan
  - f. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan.
4. Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang desentralistik, dengan sasaran strategis:
- a. Meningkatnya implementasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah;
  - b. Terevaluasinya kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - c. Terevaluasinya perkembangan Daerah Otonom Baru dan tersusunnya Strategi Dasar Penataan daerah (SDPD/*grand strategy*);
  - d. Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan tindak lanjut penyelesaian peraturan pelaksanaannya;
  - e. Tersusunnya UU tentang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan terselenggaranya Pilkada yang efisien; dan
  - f. Terwujudnya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan otonomi daerah, baik di Pusat maupun antara Pusat dan Daerah dalam rangka reformasi regulasi secara bertahap.
5. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah, dengan sasaran strategis:

- a. Terwujudnya tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisiensi pemanfaatan APBD;
  - b. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; dan
  - c. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di Daerah.
6. Terciptanya pertumbuhan pembangunan di daerah, serta keseimbangan pembangunan antar daerah yang didukung oleh efektivitas kinerja pemerintah daerah, dengan sasaran strategis:
- a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;
  - b. Tersedianya peta pertumbuhan dari masing-masing daerah, kawasan dan wilayah;
  - c. Tersusunnya kebijakan pembangunan daerah yang mempertimbangkan kesenjangan masing masing daerah, kawasan dan wilayah sebagai dasar dalam memformulasikan dana perimbangan (DAK, DAU dan DBH);
  - d. Meningkatnya kualitas penataan ruang, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - e. Terlaksananya implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota dan pembatalan Perda bermasalah, serta pengurangan biaya untuk bisnis;
  - f. Peningkatan Private Public Partnership;
  - g. Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas Kementerian/Lembaga (K/L), serta pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi rakyat banyak;
  - h. Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum; dan
  - i. Dukungan Reformasi bidang pelayanan umum
7. Mewujudkan otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya, dengan sasaran strategis:
- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa;
  - c. Meningkatnya kegiatan Ekonomi Produktif Masyarakat Desa;
  - d. Dukungan pengentasan daerah tertinggal dan pasca bencana melalui pemantapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP);
  - e. Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat; dan

- f. Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.
8. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan kapasitas SDM aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dengan sasaran strategis:
  - a. Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas keuangan;
  - b. Meningkatnya jumlah alumni dan kesesuaian peserta dengan persyaratan Diklat;
  - c. Terlaksananya reformasi diklat aparatur dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan
  - d. Tersedianya kader aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang profesional dan berkualitas.
9. Meningkatnya kualitas dan terimplikasinya secara optimal perencanaan, agenda strategis, program legislasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN, sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan lingkup Kementerian Dalam Negeri; serta terselenggaranya reformasi birokrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri, dengan sasaran strategis:
  - a. Tersedianya dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan agenda strategis Kementerian Dalam Negeri;
  - b. Terselenggaranya reformasi birokrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  - c. Terlaksananya harmonisasi Perda dan program legislasi lingkup Kementerian Dalam Negeri;
  - d. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN Kementerian Dalam Negeri;
  - e. Tersedianya sarana dan prasarana kerja Kementerian Dalam Negeri secara berkualitas dan sesuai kebutuhan; dan
  - f. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan



KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp X 1.000)										KET (PN/PB/ KL)
			OPERASIONAL		NON OPERASIONAL						TOTAL		
			01	02	RUPIAH MURNI	PLN	HLN	PNBP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
9.	Persentase (%) Capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.	20%											
1214	Kegiatan Penataan Produk Hukum Dan Pelayanan Bantuan Hukum	Meningkatnya keseluruhan arah dalam implementasi pembangunan yang diwujudkan melalui harmonisasi peraturan Perundang-undangan, kajian hukum dan kebijakan daerah, serta penyiapan produk hukum, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum, dan dokumentasi hukum lingkup Kemendagri	-	-	8.025,800	-	-	-	-	8.025,800			
	1. Jumlah Perda yang di Klarifikasi	2500 Perda			1,200,000					1,200,000		PN	
	2. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang di Evaluasi dan/atau Konsultasikan	350 Ranperda			837,310					837,310		KL	
	3. Jumlah Peraturan perundang-undangan Kemendagri yang masuk Prolegdagri	60 Rancangan Perundang-Undangan			1,500,000					1,500,000		KL	
	4. Persentase penyelesaian sengketa hukum di Lembaga Peradilan dan Bantuan Hukum	100%			2,206,490					2,206,490		KL	
	5. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Biro Hukum	100%			2,282,000					2,282,000		KL	
1215	Kegiatan Pembinaan Dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas pengelolaan pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	-	200,000	13,050,000					13,250,000			
	1. Peningkatan kualitas proses seleksi yang transparan dan tepat jadwal	55%			1,200,000					1,200,000		KL	
	2. Tingkat kepuasan pegawai atas pengelolaan SDM Kemendagri	40%		200,000	9,075,000					9,275,000		KL	
	3. Persentase fasilitasi layanan Aparatur Sipil Negara Instansi Daerah yang sesuai ketentuan	25%			1,900,000					1,900,000		KL	
	4. Persentase kegiatan ketatausahaan Biro Kepegawaian	100%			875,000					875,000		KL	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp X 1000)							KET (PN/PP/ KL)	
			OPERASIONAL		NON OPERASIONAL						
			01	02	RUPIAH MURNI	PLN	HLN	PNBP	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1216	Kegiatan Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan, Dan Pelaporan Kinerja	Meningkatnya kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa jabatan dan pelaporan kinerja Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, tersedianya peraturan pemerintah pengganti PP No 41 tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya dalam rangka efektifitas dan efisiensi penerapan SPM, serta harmonisasi perundang-undangan sektor dalam pembentukan organisasi sektor di daerah	-	-	7,945,000	-	-	-	-	7,945,000	
	1. Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kemendagri	1 Dokumen			1,050,000					1,050,000	KL
	2. Persentase Penerapan Hasil Analisa Jabatan Kemendagri	85 % pelaksanaan hasil Anjab			1,000,000					1,000,000	KL
	3. Hasil Penilaian Laporan Atas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kemendagri	Kategori nilai A			850,000					850,000	KL
	4. Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan dan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Dokumen			3,995,000					3,995,000	KL
	5. Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Biro Organisasi	100%			1,050,000					1,050,000	KL
1217	Kegiatan Perencanaan Program Dan Anggaran	Meningkatnya kualitas dan terimplementasinya secara optimal perencanaan program dan anggaran, serta hasil monitoring dan evaluasi lingkup Kementerian Dalam Negeri	-	-	21,934,000	-	-	-	-	21,934,000	
	1. Persentase Konsistensi Rencana Program dan Anggaran	80%			7,724,000					7,724,000	KL
	2. Persentase Konsistensi Capaian Kinerja Program dan Anggaran	80% Dokumen Capaian Kinerja sesuai target			13,410,000					13,410,000	KL
	3. Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Biro Perencanaan	100%			800,000					800,000	KL
1218	Kegiatan Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga, Pengamanan, Dan Keprotokolanan	Meningkatnya pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga, Pengamanan dan urusan Keprotokolanan serta terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	-	49,024,795	30,300,163	-	-	-	-	79,324,978	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp X 1000)							KET (PN/PB/ KL)	
			OPERASIONAL		NON OPERASIONAL				TOTAL		
			01	02	RUPIAH MURNI	PLN	HLN	PNBP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Tingkat Ketepatan Waktu Operasional Pelayanan Ketatausahaan, Keremahanggaan, Pengamanan, dan Keprotokolan	100%			14,244,400					14,244,400	KL
2.	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan				9,605,183					9,605,183	KL
3.	Persentase penyelesaian pelayanan operasional kerja (operasional dan pemeliharaan perkantoran serta liangganan daya dan jasa) lingkup Setjen yang tepat waktu	12 Bulan Layanan		49,024,795						49,024,795	KL
4.	Penyelenggaraan Koordinasi Jejaring Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia	7 Dokumen			6,450,600					6,450,600	KL
1219	Kegiatan Penataan Administrasi Kerjasama Luar Negeri	Tertatanya pengelolaan administrasi kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Luar Negeri			9,251,000					9,251,000	
	1. Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Beasiswa Luar Negeri tepat waktu	7 hari			805,000					805,000	KL
	2. Persentase Fasilitasi Penataan Kerjasama Kemendagri dan Pemerintah Daerah dengan Luar Negeri yang sesuai ketentuan	100%			7,571,000					7,571,000	KL
	3. Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Pada Pusat AKLN	100%			875,000					875,000	KL
1220	Pengelolaan Administrasi Keuangan Dan Aset	Memungkainya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN Kemendagri	172,305,640	953,320	13,165,471					186,424,431	
	1. Peningkatan Kualitas Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri	WTP			5,399,614					5,399,614	KL
	2. Persentase Tertib BMN Lingkup Kemendagri sesuai Peraturan yang Berlaku	100%			2,521,661					2,521,661	KL
	3. Persentase Tertib Pengelolaan keuangan lingkup Sekretariat Jenderal yang akuntabel dan tepat waktu	100%			1,610,000					1,610,000	KL
	4. Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Geji dan Tunjangan Pegawai) yang tepat waktu	100%	172,305,640	953,320						173,258,960	KL

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp X 1000)										KET (PN/PB/ KL)
			OPERASIONAL		NON OPERASIONAL						TOTAL		
			01	02	RUPIAH MURNI	PLN	HLN	PNBP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	5. Persentase Dukungan Layanan ULP Lingkup Kemendagri	100%			1,362,650						1,362,650	KL	
	6. Persentase Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Pusat AKPA	100%			2,271,546						2,271,546	KL	
1221	Kegiatan Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi Dan Telekomunikasi	Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan data, informasi, komunikasi dan telekomunikasi lingkup Kemendagri	-	3,587,200	36,192,800	-	-	-	-	-	39,780,000		
	1. Pengelolaan Data dan Informasi Pokok Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri yang disajikan	3 Dokumen			2,727,400						2,727,400	KL	
	2. Persentase Layanan Persandian dan Telekomunikasi Pemerintahan Dalam Negeri	100%			8,339,200						8,339,200	KL	
	3. Persentase Sistem TIK yang dimanfaatkan	100%			23,248,800						23,248,800	KL	
	4. Persentase penyelesaian operasional layanan data, informasi, komunikasi dan telekomunikasi yang tepat waktu	12 Bulan Layanan		3,587,200	-						3,587,200	KL	
	5. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Pusdatinkomtel	100%			1,877,400						1,877,400	KL	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp X 1000)										KET (PN/PB/ KL)
			OPERASIONAL		NON OPERASIONAL						TOTAL		
			01	02	RUPIAH MURNI	PLN	HLN	PNEP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1222	Pengkajian Kebijakan Strategik	Terpenuhinya kebutuhan rumusan kebijakan dan program strategis Kementerian Dalam Negeri secara terintegrasi.	-	-	9,355,000	-	-	-	9,355,000				
	1. Persentase isu strategis dan masalah strategis yang dianalisis sesuai tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri.	50%			2,300,000				2,300,000		KL		
	2. Persentase hasil kajian dalam rangka penyusunan rekomendasi untuk memformulasi kebijakan dan program strategis Kementerian Dalam Negeri.	50%			4,400,000				4,400,000		KL		
	3. Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendagri.	20%			1,550,000				1,550,000		KL		
	4. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Pusat Jakstra	100%			1,105,000				1,105,000		KL		
1223	Kegiatan Pengelolaan Kehumasan	Terselenggaranya Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan penyebarluasan informasi kepada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat serta pendokumentasian.	-	-	10,235,000	-	-	-	10,235,000				
	1. Persentase Fasilitasi dan Pelayanan Hubungan Masyarakat dan Pengabdian	100%			5,950,000				5,950,000		KL		
	2. Persentase Pengelolaan Perpustakaan dan Pengembangan e-library Kemendagri	100%			2,050,000				2,050,000		KL		
	3. Persentase Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Pusat Penerangan	100%			2,235,000				2,235,000		KL		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp X 1000)										KET (PN/PB/ KL)
			OPERASIONAL		NON OPERASIONAL						TOTAL		
			01	02	RUPIAH MURNI	PLN	HLN	PNEP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana Kemendagri	-	-	40,000,000	-	-	-	40,000,000				
1224	Kegiatan Peningkatan Dan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan	-	-	40,000,000	-	-	-	40,000,000				
	1. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan kedisiplinan IPDN di Provinsi Kalimantan Barat	100%			40,000,000				40,000,000		KL		

Keterangan:

PN : Prioritas Nasional

PB : Prioritas Bidang

KL : Prioritas Kementerian

KK : Kontrak Kinerja

RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
TAHUN ANGGARAN 2015  
(BERDASARKAN PAGU ALOKASI ANGGARAN)

SATKER: INSPEKTORAT JENDERAL

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp X 1000)							KET (PN/PB/ KL)
			OPERASIONAL		NON OPERASIONAL			TOTAL		
			01	02	RUPIAH MURNI	PLN	HLN		PNNP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Aparatur; Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Di Lingkungan Kemendagri; Serta Kinerja Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	26,149,465	7,551,957	33,860,653	-	-	-	69,562,075	
	1. Persentase Tingkat Ketaatan Aparatur Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Di Unit Kerja Lingkup Kemendagri	90%								
	2. Persentase Tingkat Ketaatan Aparatur Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Provinsi	90%								
	3. Persentase Tingkat Penyelesaian Kasus-Kasus Dan Pengaduan Khusus Atas Petunjuk Menteri Di Unit Kerja Lingkup Kemendagri Dan Provinsi Serta Kabupaten/Kota Tertentu	80%								
	4. Jumlah Revisi Laporan Keuangan Komponen Kementerian Dalam Negeri Yang Sesuai Dengan SAP	Tersusunnya Revisi Laporan Keuangan Komponen Kementerian Dalam Negeri Yang Sesuai Dengan SAP								
	5. Peningkatan Peringkat Kualitas Lakiip Kementerian Dalam Negeri	5 Besar								
1225	Kegiatan Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah I	Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi; transparansi dan akuntabilitas keuangan di lingkungan kemendagri; serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada wilayah I	-	-	5,367,452	-	-	-	5,367,452	
	1. Presentase tingkat ketaatan aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada unit kerja lingkup kemendagri meliputi Ditjen Otda, Badan Diklat, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)	90%			1,156,859				1,156,859	KL

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp X 1000)										KET (PN/PB/ KL)	
			OPERASIONAL					NON OPERASIONAL						TOTAL
			01	02	02	RUPIAH MURNI	PLN	HLN	PNBP	TOTAL				
											4	5		
1	2	3	90%	4	5	6	7	8	9	10	11	KL		
	2. Prosentase tingkat ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah di provinsi Banten, DI. Yogyakarta, Sulawesi Barat, Bengkulu, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan Papua Barat					4,210,593						4,210,593	KL	
1226	Kegiatan Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah II	Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi; transparansi dan akuntabilitas keuangan di lingkungan Kemendagri; serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada wilayah II				5,085,184						5,085,184		
	1. Prosentase tingkat ketaatan aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada unit kerja lingkup Kemendagri meliputi Setjen, Ditjen PMD, dan Itjen	90%				770,821						770,821	KL	
	2. Prosentase tingkat ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah di provinsi Jawa Timur, Bali, Riau, Lampung, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Maluku	90%				4,314,363						4,314,363	KL	
1227	Kegiatan Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah III	Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi; transparansi dan akuntabilitas keuangan di lingkungan Kemendagri; serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada wilayah III				4,331,648						4,331,648		
	1. Prosentase tingkat ketaatan aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada unit kerja lingkup Kemendagri meliputi Ditjen Dukcapil, Ditjen Kesbangpol, dan Ditjen Keuda	90%				367,806						367,806	KL	
	2. Prosentase tingkat ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah di provinsi Jawa Barat, Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara	90%				3,963,842						3,963,842	KL	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp X 1000)										KET (PN/PB/ KL)
			OPERASIONAL		NON OPERASIONAL					TOTAL			
			01	02	RUPIAH MURNI	PLN	HLN	PBNP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1228	Kegiatan Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah IV	Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi; transparansi dan akuntabilitas keuangan di lingkungan Kemendagri; serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada wilayah IV	-	-	4,608,961	-	-	-	4,608,961				
	1. Presentase tingkat ketaatan aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada unit kerja lingkup Kemendagri meliputi Ditjen Bina Bangsa, Ditjen PUM, dan Badan Litbang	90%			367,806				367,806		KL		
	2. Presentase tingkat ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah di provinsi Jawa Tengah, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Papua	90%			4,241,155				4,241,155		KL		
1229	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	Dukungan Pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal	26,149,465	7,551,957	13,264,208	-	-	-	46,965,630				
	1. Presentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	Terbayarnya 12 layanan bulanan	26,149,465	7,551,957					33,701,422		KL		
	2. Presentase penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran	100%			6,684,208				6,684,208		KL		
	3. Presentase Penyelesaian Dokumen Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan	100%			2,200,000				2,200,000		KL		
	4. Presentase penyelesaian Dokumen Administrasi Tata Usaha dan Keuangan	100%			1,880,000				1,880,000		KL		
	5. Presentase penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawaian dan Rumah Tangga	100%			2,500,000				2,500,000		KL		
	6. Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Inspektorat Jenderal	100%			-				-		KL		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp X 1000)							KET (PN/PB/ KL)
			OPERASIONAL		NON OPERASIONAL			TOTAL		
			01	02	RUPIAH MURNI	PLN	HLN		PNNP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.230	Kegiatan Penyelenggaraan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian Kasus dan Pengaduan Khusus	Tertangannya kasus dan pengaduan masyarakat di lingkungan Kemendagri dan pemerintahan daerah	-	-	3,203,200	-	-	-	3,203,200	
	1. Prosentase penanganan kasus dan khusus serta pengaduan masyarakat pada 12 unit kerja Kemendagri dan 33 provinsi serta Kabupaten/Kota tertentu	80%			3,203,200				3,203,200	KL

Keterangan:

PN : Prioritas Nasional

PB : Prioritas Bidang

KL : Prioritas Kementerian

KK : Kontrak Kinerja

RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
TAHUN ANGGARAN 2015  
(BERDASARKAN PAGU ALOKASI ANGGARAN)

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp X 1000)										KET (PN/PB/ KL)
			OPERASIONAL				NON OPERASIONAL				PNBP	TOTAL	
			01	02	05	04	RUPIAH MURNI	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
04	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.	Meningkatnya kualitas kebijakan lingkup Kerendagri yang didukung oleh hasil kelibangan (penelitian, pengembangan, pengkajian, perkerjasama, penerapan, dan pengoperasian) serta pemanfaatan hasil kelibangan sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan	20,687,098	5,521,259	38,662,383	-	-	-	64,870,740				
	1. Prosentase hasil Kelibangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perkerjasama, penerapan, dan pengoperasian) yang diseminarkan, dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti	65%											
1280	Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Pusat Pembangunan Dan Keuangan Daerah	Tersusunnya hasil-hasil penelitian, pengkajian, pengembangan, perkerjasama, penerapan, pengoperasian, dan forum diskusi aktual serta pembinaan, supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelibangan pusat pembangunan dan keuangan daerah yang berkualitas	-	-	4,484,750	-	-	-	4,484,750				
	1. Prosentase hasil Kelibangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perkerjasama, penerapan, dan pengoperasian) Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan, dipublikasikan dan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti	100%			3,000,000				3,000,000		KL		
	2. Jumlah hasil Forum Diskusi Aktual (FDA) Pusat Pembangunan dan Keuangan Daerah yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti	6 rekomendasi			300,000				300,000		KL		

SATKER: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp X 1000)							TOTAL	KET (PN/PB/ KL)
			OPERASIONAL			NON OPERASIONAL					
			01	02		RUPIAH MURNI	PLN	HLN	PNEBP		
			4	5	6	7	8	9			
1	2 3. Prosentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Pusat Pembangunan dan Keuangan Daerah	3 100%					1,184,750			10 1,184,750	11 KL
1281	Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Pusat Kesatuan Bangsa, Politik, Dan Otonomi Daerah	Tersusunnya hasil-hasil penelitian, pengkajian, pengembangan, perencanaan, pelaksanaan, dan Forum Diskusi Aktual serta pembinaan, supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan pusat kesatuan bangsa, politik, dan otonomi daerah yang berkualitas					4,300,000			4,300,000	
	1. Prosentase hasil Kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, pelaksanaan, perencanaan, dan pengoperasian) Pusat Kesbangpol dan Orda yang diseminarkan, dipublikasikan dan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti	100%					3,000,000			3,000,000	KL
	2. Jumlah hasil Forum Diskusi Aktual (FDA) Pusat Kesbangpol dan Orda yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti	6 rekomendasi					300,000			300,000	KL
	3. Prosentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Pusat Kesbangpol dan Orda	100%					1,000,000			1,000,000	KL
1282	Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Pusat Pemerintahan Umum Dan Kependudukan	Tersusunnya hasil-hasil penelitian, pengkajian, pengembangan, perencanaan, pelaksanaan, dan forum diskusi aktual serta pembinaan, supervisi, fasilitasi, dan evaluasi kelitbangan pusat pemerintahan umum dan kependudukan yang berkualitas					4,250,000			4,250,000	
	1. Prosentase hasil Kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, pelaksanaan, dan pengoperasian) Pusat Pemerintahan umum dan Kependudukan yang diseminarkan, dipublikasikan dan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti	100%					2,677,171			2,677,171	KL

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp X.1000)							TOTAL	KET (PN/PB/ KL)		
			OPERASIONAL			NON OPERASIONAL							
			01	02		RUPIAH MURNI	PLN	HLN	PNEBP				
			4	5	6	7	8	9					
1	2	3			300,000				10	11	300,000	KL	
	2. Jumlah hasil Forum Diskusi Aktual (FDA) Pusat Pemerintahan umum dan Kependudukan yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti	6 rekomendasi			300,000								
	3. Prosentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Pusat Pemerintahan umum dan Kependudukan	100%			1,272,829							1,272,829	KL
1283	Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Pusat Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat	Tersusunnya hasil-hasil penelitian, pengkajian, pengembangan, perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, dan forum diskusi aktual serta evaluasi kelibangan pusat pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas			4,200,000							4,200,000	
	1. Prosentase hasil Kelibangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengoperasian) Pusat Litbang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat yang diseminarkan, dipublikasikan dan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti	100%			2,778,226							2,778,226	KL
	2. Jumlah hasil Forum Diskusi Aktual (FDA) Pusat Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti	6 rekomendasi			300,000							300,000	KL
	3. Prosentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Pusat Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	100%			1,121,774							1,121,774	KL
1284	Kegiatan Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri	Terpenuhnya dukungan pelayanan teknis dan administrasi yang berkualitas di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan	20,687,098	5,521,259	21,427,633							47,635,990	
1.	Prosentase penyelesaian dokumen Perencanaan dan Anggaran, Pengelolaan Data dan Evaluasi Kinerja serta Hukum dan Perundang-undangan	100%			3,172,241							3,172,241	KL

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp X 1000)										KET (PN/PB/ KL)		
			OPERASIONAL		NON OPERASIONAL						PNBP	TOTAL			
			01	02	RUPIAH MURNI	PLN	HLN	PLN	HLN						
										04				05	6
1	2	3											10	11	
2.	Prosentase pelayanan Administrasi Ketatausahaan, Kepegawaian, dan Kerumahtanggaan	100%				2,926,591								2,926,591	KL
3.	Prosentase penyelesaian administrasi Anggaran, Perbendaharaan, serta Verifikasi dan Akuntansi yang tepat waktu	100%				2,352,454								2,352,454	KL
4.	Prosentase penyelesaian Administrasi Kerjasama, Akreditasi Peneliti dan Perakayasa, serta Pengelolaan Perpustakaan	100%				3,976,347								3,976,347	KL
5.	Prosentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	12 Bulan layanan	20,687,098	5,521,259										26,208,357	KL
6.	Prosentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	100%				9,000,000								9,000,000	KL

Keterangan:

PN : Prioritas Nasional

PB : Prioritas Bidang

KL : Prioritas Kementerian

KK : Kontrak Kinerja

RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
TAHUN ANGGARAN 2015  
(BERDASARKAN PAGU ALOKASI ANGGARAN)

SATKER: BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	RENCANA KERJA TAHUN 2015 (Rp X 1000)							TOTAL	KET (PN/PB/ KL)
			OPERASIONAL			NON OPERASIONAL					
			01	02	03	RUPIAH MURNI	PLN	HLN	PNEP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI	Meningkatnya jumlah alumni, kesesuaian peserta dengan persyaratan Diklat, dan terlaksananya reformasi Diklat aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	61,198,422	19,832,148	161,936,985	-	-	25,064,300	268,031,855		
1	1 Jumlah Pedoman Standardisasi Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi	1 dokumen									
2	2 Jumlah Alumni Diklat Aparatur Berbasis Kompetensi	9360 orang									
3	3 Jumlah Alumni Orientasi Kepemimpinan Daerah	1660 orang									
1285	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Teknis yang berkualitas	-	-	36,456,090	-	-	2,389,603	38,845,693		
1	1 Penyusunan Kebijakan Teknis, Rencana, dan Program Diklat Struktural dan Teknis	7 Naskah	-	-	1,100,000	-	-	-	1,100,000	KL	
2	2 Pengkoordinasian dan Fasilitasi Satker Penyelenggara Diklat Struktural dan Teknis	3 Laporan	-	-	150,000	-	-	-	150,000	KL	
3	3 Pelaksanaan Diklat Struktural dan Teknis	56 Angkatan	-	-	34,906,090	-	-	2,389,603	37,295,693	KL	
4	4 Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Dampak Pelaksanaan Diklat Struktural dan Teknis	3 Laporan	-	-	300,000	-	-	-	300,000	KL	
1287	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah yang berkualitas	-	-	4,785,000	-	-	3,741,543	8,526,543		
1	1 Penyusunan Kebijakan Teknis, Rencana, dan Program Diklat Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuda	9 Naskah	-	-	1,500,000	-	-	-	1,500,000	KL	
2	2 Pengkoordinasian dan Fasilitasi Satker Penyelenggara Diklat Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuda	3 Laporan	-	-	150,000	-	-	-	150,000	KL	
3	3 Pelaksanaan Diklat Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuda	86 Angkatan	-	-	2,835,000	-	-	3,741,543	6,576,543	PB	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	RENCANA KERJA TAHUN 2015 (Rp X 1.000)						TOTAL	KET (PV/PB/ KL)	
			OPERASIONAL		NON OPERASIONAL						
			01	02	RUPIAH MURNI	PLN	HLN	PNEBP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	4 Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Dampak Pelaksanaan Diklat Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuda	3 Laporan	-	-	300,000	-	-	-	-	300,000	KL
1288	Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Diklat	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Bidang Jabatan Fungsional, Pengelolaan Administrasi Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional, serta Standardisasi dan Sertifikasi Kerjasama Kediklatan Kementerian Dalam Negeri	-	-	8,650,000	-	-	-	2,705,236	11,355,236	
1	1 Penyusunan Kebijakan Teknis, Rencana, dan Pembinaan, serta Program Diklat Jabatan Fungsional dan Standardisasi Diklat	3 Naskah	-	-	500,000	-	-	-	-	500,000	KL
2	2 Pengkoordinasian dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Diklat di Lingkungan Kemendagri dan Pemda	3 Laporan	-	-	150,000	-	-	-	-	150,000	KL
3	3 Pengelolaan Administrasi, Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional	12 Laporan	-	-	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	KL
4	4 Pelaksanaan Standardisasi dan Sertifikasi serta Kerjasama Diklat Pemerintah Dalam Negeri	1 Dokumen	-	-	4,300,000	-	-	-	-	4,300,000	KL
5	5 Pelaksanaan Diklat Fungsional Pemerintah Dalam Negeri	32 Angkatan	-	-	1,400,000	-	-	-	2,705,236	4,105,236	KL
6	6 Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Dampak Diklat serta Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standardisasi Diklat	3 Laporan	-	-	300,000	-	-	-	-	300,000	KL
1289	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen & Kepemimpinan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pendidikan dan pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah yang berkualitas	-	-	14,591,525	-	-	-	1,375,376	15,966,901	
1	1 Penyusunan Kebijakan Teknis, Rencana, dan Program Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Pemda	9 Naskah	-	-	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	KL
2	2 Pengkoordinasian dan Fasilitasi Satker Penyelenggara Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Pemda di Lingkungan Kemendagri dan Pemda	5 Laporan	-	-	5,650,000	-	-	-	-	5,650,000	KL
3	3 Pelaksanaan Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Pemda	49 Angkatan	-	-	7,141,525	-	-	-	1,375,376	8,516,901	PB

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	RENCANA KERJA TAHUN 2015 (Rp X 1000)								TOTAL	KET (PN/PB/ KL)
			OPERASIONAL			NON OPERASIONAL						
			01	02	RUPIAH MURNI	PLN	HLN	PNBP				
								02	03			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1290	4 Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Dampak Pelaksanaan Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Pemda Pendidikan dan Pelatihan Regional	3 Laporan Pemberian layanan dukungan administrasi dan pelayanan teknis lainnya pada Pusat Diklat Kemendagri Regional serta peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan kediklatan lingkup Pusat Diklat Kemendagri Regional	32,496,594	10,563,171	57,507,091	-	-	14,852,542	115,419,398	KL		
	1 Pengkoordinasian dan Fasilitas Penyelenggaraan Diklat Pemerintahan Dalam Negeri	17 Laporan			2,167,490				2,167,490	KL		
	2 Pelaksanaan Diklat Pemerintahan Dalam Negeri	111 Angkatan			13,103,873			14,719,442	27,823,315	KL		
	3 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	100%	32,496,594	10,563,171	42,235,728			133,100	85,428,593	KL		
1291	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan	Dukungan pelayanan teknis dan administratif di bidang pendidikan dan pelatihan yang berkualitas	28,701,828	9,268,977	39,947,279	-	-	-	77,918,084			
	1 Manajemen Aset, rumah Tangga, Administrasi, dan Umum	100%		9,268,977	2,473,338				11,742,315	KL		







KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp X 1000)							KET (PN/PB/ KL)	
			OPERASIONAL		NON OPERASIONAL				TOTAL		
			01	02	RUPIAH MURNI	PLN	HLN	PBNP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9	Prosentase forum BKPRD yang efektif (KK 10.2)	33 Prov									
10	Prosentase tersusunnya penda-taan dan pengkategorisasian daerah-daerah yang mampu dan tidak mampu dalam penerapan tata ruang melalui PTSP (KK 10.3)	100%									
11	Jumlah kebijakan fasilitasi pemberian perijinan melalui PTSP yang berpedoman RTRW provinsi, RTRW kabupaten/ kota (KK 10.4)	1									
12	Persentase Jumlah pemerintah daerah yang menegakkan Perda RTRW Provinsi secara konsekuen (KK 10.5)	95%									
1251	Kegiatan Fasilitasi Penataan Ruang Daerah Dan Lingkungan Hidup Di Daerah	Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas K/L serta pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi rakyat banyak, konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum, dukungan reformasi bidang pelayanan umum, serta meningkatnya tertib pemanfaatan ruang daerah berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	-	-	112,482,140	10,000,000	6,500,000	-	128,982,140		
1	Jumlah Regulasi dan Kebijakan terkait dengan penataan ruang, Sumberdaya Alam dan lingkungan hidup di daerah yang terselesaikan	3 Permendagri, 4 Pedoman			4,480,000				4,480,000	KL	
2.	Jumlah daerah yang terfasilitasi dan meningkat dalam penerapan tata kelola penataan ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup	34 Provinsi, 162 kab/kota			102,002,140	10,000,000	6,500,000		118,502,140	PB	
3	Jumlah daerah yang dimonitor dan dievaluasi dalam penerapan tata kelola penataan ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup	34 Provinsi, 162 kab/kota (2 laporan)			4,000,000				4,000,000	KL	
4	Prosentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat penataan ruang dan lingkungan hidup	100%			2,000,000				2,000,000	KL	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp X 1000)							KET (PN/PB/ KL)	
			OPERASIONAL		NON OPERASIONAL			PNBP	TOTAL		
			01	02	RUPIAH MURNI	PLN	HLN				8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1252	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, Public Private Partnership, serta terlaksananya implementasi Sisdin Infromasi Perijinan SPIPISE pada PTSP di beberapa kota dan pembatalan Perda bermasalah, serta pengurangan biaya untuk bisnis	-	-	44,094,731	-	-	-	-	44,094,731	
	1. Jumlah Kebijakan/pedoman terkait dengan peningkatan kualitas tata kelola dan daya saing perekonomian daerah yang diselesaikan	4 peraturan dan 3 pedoman			5,800,000	-	-	-	-	5,800,000	KL
	2. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan, infrastruktur ekonomi dan daya saing perekonomian daerah	10 Provinsi / 50 kab/kota			31,839,731	-	-	-	-	31,839,731	PB
	3. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan, infrastruktur ekonomi dan daya saing perekonomian daerah	6 Laporan			4,455,000	-	-	-	-	4,455,000	KL
	4. Presentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat Pengembangan Ekonomi Daerah	100%			2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	KL
1253	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu	Terwujudnya Optimalisasi Pengembangan Wilayah Tertinggal, Perbatasan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Lainnya.	-	-	83,883,840	29,762,360	-	-	-	113,646,200	
	1. Jumlah regulasi dan kebijakan pembangunan daerah berbasis wilayah	2 Peraturan			1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	KL
	2. Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam penerapan kebijakan penyerasian pembangunan daerah berbasis wilayah	4 provinsi (region Sumatera)			15,883,840	-	-	-	-	15,883,840	KL
	3. Jumlah daerah yang melaksanakan kebijakan pembangunan daerah berbasis wilayah (implementasi dan fasilitasi)	- 18 Prov, 254 Kab/Kota Daerah andalan dan strategis - 21 Prov, 140 Kab/Kota daerah tertinggal - 18 Prov Daerah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil			60,500,000	29,762,360	-	-	-	90,262,360	PB

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp X 1000)								KET (PN/PB/ KL)
			OPERASIONAL		NON OPERASIONAL				PNBP	TOTAL	
			01	02	MURNI	PLN	HLN	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	4 Evaluasi daerah yang melaksanakan kebijakan pembangunan daerah berbasis wilayah	- 15 Prov 120 Kab/Kota Daerah andalan dan strategis - 12 Prov daerah tertinggal - 3 Prov Daerah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil			4,000,000	-	-	-	-	4,000,000	KL
	5 Tingkat pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat Pengembangan Wilayah	100%			2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	KL
1254	Kegiatan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah			51,408,780	-	-	-	-	51,408,780	
	1 Persentase Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan	100%			2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	KL
	2 Persentase provinsi yang menyusun dokumen rencana pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan	30% dari 34 Provinsi (9 Provinsi)			42,408,780	-	-	-	-	42,408,780	KL
	3 Persentase monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	100%			4,500,000	-	-	-	-	4,500,000	KL
	4 Persentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat Perencanaan Pembangunan Daerah	100%			2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	KL
1255	Kegiatan Fasilitasi Penataan Perkotaan	Peningkatan tata kelola penataan perkotaan di daerah			41,800,000	-	-	-	-	41,800,000	
	1. Jumlah Peraturan/Kebijakan Penataan Perkotaan	2 RPP dan 5 Pedoman			6,850,000	-	-	-	-	6,850,000	PB
	2. Persentase Pelaksanaan Evaluasi Penataan Perkotaan	14% Kota Metropolitan (2), 12% Kota Besar, 10% Kota Sedang dan Kecil			1,750,000	-	-	-	-	1,750,000	PB
	3. Persentase Peningkatan kapasitas Daerah dalam Penataan Perkotaan	14% Kota Metropolitan (2), 12% Kota Besar, 10% Kota Sedang dan Kecil			31,700,000	-	-	-	-	31,700,000	PB
	4. Persentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat Penataan Perkotaan	100%			1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	KL

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp X 1000)						TOTAL	KET (PN/PB/ KL)
			OPERASIONAL		NON OPERASIONAL					
			01	02	RUIPAH MURNI	PLN	HLN	PNEP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1256	Kegiatan Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	Dukungan pelayanan teknis administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	36,075,611	8,633,292	106,253,439	-	-	-	150,962,342	
	1 Prosentase Penyelesaian Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program, Kegiatan dan Anggaran Ditjen Bina Bangsa yang tepat waktu	100%			12,800,000	-	-	-	12,800,000	KL
	2 Prosentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (01 dan 02) yang Tepat Waktu	100%	36,075,611	8,633,292	-	-	-	-	44,708,903	KL
	3 Prosentase Dukungan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana serta Tugas Teknis dan Fungsional Lainnya pada Ditjen Bina Bangsa yang optimal	100%			77,748,439	-	-	-	77,748,439	KL
	4 Prosentase Fasilitasi Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah yang optimal	100%			8,000,000	-	-	-	8,000,000	KL
	5 Prosentase Peningkatan Kapasitas Aparatur di Lingkungan Ditjen Bina Bangsa	100%			2,810,000	-	-	-	2,810,000	KL
	6 Prosentase fasilitasi Penyusunan Program Legislasi dan Sistem dan Prosedur di Lingkungan Ditjen Bina Bangsa	100%			4,895,000	-	-	-	4,895,000	KL

Keterangan:

PN : Prioritas Nasional

PB : Prioritas Bidang

KL : Prioritas Kementerian

KK : Kontrak Kinerja



KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp X 1000)						KET (PN/PE/ KL)		
			OPERASIONAL		NON OPERASIONAL						
			01	02	RUPIAH MURNI	PLN	HLN	TOTAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	8 Peraturan perundang-undangan tentang Pemilu KDH dan WKDH: a. Revisi terbatas UU No.32 Tahun 2004 (KK 2.1) (PN); b. Kajian mengenai Gub (KK 2.2); c. Kajian terkait posisi dan pemilihan Wakil KDH (KK 2.3); d. UU tentang Pemilu KDH dan Wakil KDH (KK 2.4) (PN)										
	9 Persentase inventarisasi peraturan per-uu-an sektor yang belum sejalan dengan peraturan perUUan Otda di pusat dan di daerah. (KK 1.1.1) (PB)	100%									
	10 Persentase Peraturan per UUan yang diharmonisasikan terkait dalam upaya sinkronisasi regulasi Otda. (KK 1.1.2) (PB)	50%									
1258	Kegiatan Fasilitas KDH, DPRD Dan Hubungan Antar Lembaga	Meningkatnya Kapasitas kepala daerah dan pimpinan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; kinerja Kepala Daerah dan DPRD; kualitas Perda yang berasal dari usul inisiatif DPRD; kualitas regulasi Pilkada; serta hubungan antar lembaga/asosiasi daerah.	-	-	17,000,000	-	-	-	-	17,000,000	
	1 Penyusunan serta tindak lanjut Peraturan/Keputusan tentang Pejabat Negara dan DPRD	4 peraturan			7,000,000					7,000,000	KL
	2 Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD	9 Gubernur, 167 Bupati, 26 Walikota			6,750,000					6,750,000	KL
	3 Pembinaan dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan daerah	7 asosiasi daerah dan 202 LKPJ			3,250,000					3,250,000	KL
1259	Kegiatan Penataan Daerah Otonom Dan Otonomi Khusus Dan DPOD	Terselenggaranya pembinaan dan tersusunnya laporan pelaksanaan penataan Daerah Otonom Baru dan Otonomi Khusus; serta rekomendasi DPOD.	-	-	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	
	1 Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru	Terlaksananya Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru pada 51 DOB			1,500,000					1,500,000	KL
	2 Penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur penataan daerah, otonomi khusus/istimewa dan DPOD	Tersusunnya 6 Rancangan Peraturan perundang-undangan yang mengatur penataan daerah, otonomi khusus/istimewa dan DPOD			4,400,000					4,400,000	KL
	3 Fasilitas pelaksanaan kebijakan penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa	Terfasilitasinya pelaksanaan kebijakan otonomi khusus dan daerah istimewa pada 54 DOB			7,300,000					7,300,000	KL





KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp x 1000)										KET (PN/PB/ KL)
			OPERASIONAL				NON OPERASIONAL						
			01	02	05	06	07	08	09	TOTAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
3991	Kegiatan Penataan Urusan Pemerintahan Daerah II	Terselenggaranya perumusan kebijakan dan fasilitasi pemantapan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundangan, dan standar pelayanan minimal lingkup II.	-	-	23,000,000	-	-	-	23,000,000	-	-	23,000,000	
1	Jumlah penyusunan kebijakan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	1 RPP, 1 Permendagri, 7 Rekomendasi, 1 Pedoman Penyusunan NSPK			3,500,000				3,500,000			3,500,000	
2	Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	45 rekomendasi penyusunan NSPK, 9 rekomendasi Perda Kewenangan Provinsi dan 127 Perda Kewenangan Kab/Kota, 45 rekomendasi penyusunan Perda serta 5 bidang urusan			5,000,000				5,000,000			5,000,000	
3	Cakupan pembinaan dan fasilitasi (sosialisasi, koordinasi, bintek, advokasi serta monitoring dan evaluasi) pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di tingkat pusat dan daerah terhadap bidang urusan pemerintahan lingkup UPD II	15 bidang urusan			4,500,000				4,500,000			4,500,000	
4	Penyempurnaan dan Penerapan Indikator Utama pelayanan publik di daerah lingkup UPD II	6 SPM			10,000,000				10,000,000			10,000,000	

Keterangan:

PN : Prioritas Nasional

PB : Prioritas Bidang

KL : Prioritas Kementerian

KK : Kontrak Kinerja



KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp X 1000)							KETF (PN/PB/ KL)	
			OPERASIONAL		NON OPERASIONAL			PNBP	TOTAL		
			01	02	MURNI	PLN	HLN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	10 Presentase daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai kelembagaan Satpol PP dan Satlinmas yang sesuai standar	20%									
	11 Presentase daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai aparatur Satpol PP dan Satlinmas yang memenuhi standar	20%									
	12 Jumlah daerah yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas terkait dengan pengembangan kawasan khusus	5 Daerah									
	13 Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitas aparatnya dalam upaya penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran	20 Daerah									
	14 Jumlah sarpras yang dialokasikan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana serta bahaya kebakaran	21 Sarpras									
1237	Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat Dan Daerah Serta Kerjasama Daerah	Terfasilitasinya penyelenggaraan hubungan Pusat dan Daerah, dekonstrasi dan tugas pembantuan, kerjasama antar daerah, dan peningkatan pelayanan umum dalam rangka harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan			62,050,000					62,050,000	
	1. Jumlah Kab/Kota yang menerapkan Permendagri tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	40 Kab/Kota di 6 Provinsi			4,700,000					4,700,000	PB
	2. Jumlah daerah yang difasilitasi dan diperbaiki instrumen kerja serta regulasi terkait dengan pelayanan umum di daerah	5 Daerah			1,000,000					1,000,000	KL
	3. Jumlah rumusan kebijakan bidang hubungan pusat dan daerah, dekonstrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah, pembinaan kecamatan dan peningkatan pelayanan umum	4 Rumusan			3,950,000					3,950,000	KL
	4. Presentase fasilitasi pusat dan daerah di bidang hubungan pusat dan daerah, dekonstrasi dan tugas pembantuan, pembinaan kecamatan dan peningkatan pelayanan umum	75%			3,550,000					3,550,000	KL

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp X 1000)							KET (PN/PB/ KL)	
			OPERASIONAL		NON OPERASIONAL						
			01	02	RUPIAH MURNI	PLN	HLN	PNBP	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5.	Jumlah jenis dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dievaluasi berdasarkan prinsip dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang benar	100 DK/TP			5,000,000					5,000,000	KL
6	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi hubungan pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama antar daerah, dan peningkatan pelayanan umum	4 dokumen			1,600,000					1,600,000	KL
7	Presentase penyelesaian urusan ketatausahaan dan rumah tangga serta penyusunan data Direktorat dekonsentrasi dan kerjasama	100%			700,000					700,000	KL
8	Jumlah kumulatif daerah yang mengembangkan kerjasama daerah	30 Daerah			4,000,000					4,000,000	KL
9	Jumlah daerah yang terpelihara dan meningkat kualitas kerjasamanya terhadap kerjasama yang telah dilaksanakan	14			3,300,000					3,300,000	KL
10	Jumlah provinsi yang dibina dalam rangka peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi	34 Provinsi			31,650,000					31,650,000	PB
11	Jumlah Kecamatan yang menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan umum	200 Kecamatan			2,600,000					2,600,000	KL

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp X 1000)							KET (PN/PB/ KL)	
			OPERASIONAL		NON OPERASIONAL			PNEBP	TOTAL		
			01	02	RUPIAH MURNI	PLN	HLN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1238	Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Kawasan Dan Pertanahan	Meningkatnya pengembangan kawasan (Kawasan Sumber Daya Alam, Kawasan Sumber Daya Buatan, Kawasan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas, Kawasan Khusus, serta Kawasan Perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan)	-	-	22,200,000	-	-	-	-	22,200,000	
	1. Jumlah rumusan kebijakan bidang Kawasan Sumber Daya Alam, Kawasan Sumber Daya Buatan, Kawasan ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas, Kawasan khusus, dan pertahanan serta perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan	2 Rumusan			1,300,000	-	-	-	-	1,300,000	KL
	2. Jumlah kawasan sumber daya alam, Kawasan Sumber Daya Buatan/ Kawasan khusus dan pertahanan/ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas/dan perairan, Kelautan serta Kedirgantaraan yang dikelola dan dikembangkan	5 Kawasan			8,700,000	-	-	-	-	8,700,000	KL
	3. Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi bidang tugas kawasan sumber daya alam, kawasan sumber daya buatan, kawasan ekonomi, industri dan perdagangan bebas, kawasan khusus dan pertahanan, serta kawasan perairan, kelautan dan kedirgantaraan	3 Dokumen			2,400,000	-	-	-	-	2,400,000	KL
	4. Prosentase penyelesaian urusan ketatausahaan dan rumah tangga direktorat kawasan dan pertahanan	100%			200,000	-	-	-	-	200,000	KL
	5. Prosentase kasus yang difasilitasi dalam penyelesaian sengketa/konflik di kawasan dan pertahanan	60%			2,600,000	-	-	-	-	2,600,000	KL
	6. Prosentase Pendataan dan pemetaan perijinan pemanfaatan kawasan dan pertanian	50%			4,500,000	-	-	-	-	4,500,000	KL
	7. Penguatan Kapasitas Aparatur dan Kerelevanan daerah dalam pengelolaan kawasan dan pertanian				2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	KL

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET		ALOKASI ANGGARAN (Rp X 1000)						KET (PN/PB/ KL)
		01	02	OPERASIONAL			NON OPERASIONAL			
				RUPIAH MURNI	PLN	HLN	PNBP	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1239	Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, Dan Perlindungan Masyarakat	Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas Aparat dan Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Menciptakan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	6 Rumusan	-	55,000,000	-	-	-	55,000,000	KL
	1. Jumlah rumusan kebijakan bidang polisi pamong praja, penyidik pegawai negeri sipil, perlindungan masyarakat, dan hak asasi manusia	6 Rumusan	6 Rumusan	-	4,800,000	-	-	-	4,800,000	KL
	2. Prosentase instansi pusat dan pemerintahan daerah yang telah sinergis di bidang tugas polisi pamong praja, penyidik pegawai negeri sipil, perlindungan masyarakat dan bidang hak asasi manusia	75%	75%	-	4,900,000	-	-	-	4,900,000	KL
	3. Jumlah Dokumen hasil laporan monitoring dan evaluasi bidang tugas polisi pamong praja dan penyidik pegawai negeri sipil, perlindungan masyarakat, serta penegakan hak asasi manusia	4 Dokumen	4 Dokumen	-	2,350,000	-	-	-	2,350,000	KL
	4. Prosentase penyelesaian urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat polisi pamong praja dan linmas	100%	100%	-	200,000	-	-	-	200,000	KL
	5. Presentase daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai kelembagaan Satpol PP dan Satlinmas yang sesuai standar	20%	20%	-	19,150,000	-	-	-	19,150,000	KL
	6. Persentase daerah yang mempunyai aparatur Satpol PP dan anggota Satlinmas yang memenuhi standar	20%	20%	-	12,300,000	-	-	-	12,300,000	KL
	7. Prosentase kesiapan satgas entry/transit/ Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB)	100%	100%	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	KL
	8. Jumlah laporan fasilitasi konferensi internasional bagi aparat satpol pp dan Linmas	2 Lap	2 Lap	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	KL

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp X 1000)										KET (PN/PB/ KL)		
			OPERASIONAL		NON OPERASIONAL						PNBP	TOTAL			
			01	02	RUPIAH MURNI	PLN	HLN								
			4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2 9 Persentase daerah yang telah memfasilitasi 5 P (penghormatan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan perlindungan) hak asasi manusia dan satgas TKIB lokasi debarkasi/embarkasi	3 80%						1,400,000						10 1,400,000	KL
	10 Persentase daerah yang melaksanakan sistem dan prosedur operasional penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	70%						1,800,000						1,800,000	KL
	11 Persentase fasilitasi kegiatan Gerakan Tertib dan Disiplin Nasional dalam rangka mewujudkan karakter bangsa	25%						5,100,000						5,100,000	KL
1240	Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana							66,950,000						66,950,000	
	1. Jumlah rumusan kebijakan bidang tugas identifikasi potensi bencana, sistem dan prosedur, sarana prasarana, serta pencegahan dan penanggulangan bencana bahaya kebakaran	8 Rumusan						4,950,000						4,950,000	KL
	2. Prosentase peningkatan sinergitas hubungan pusat daerah bidang tugas identifikasi potensi bencana, sistem dan prosedur, sarana prasarana, serta pencegahan dan penanggulangan bencana bahaya kebakaran	75%						4,900,000						4,900,000	KL
	3. Jumlah daerah yang melakukan kerjasama dalam penanggulangan bencana dan kebakaran	25 Daerah						1,700,000						1,700,000	KL

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp. X 1000)							KET (PN/PB/ KL)	
			OPERASIONAL		NON OPERASIONAL				TOTAL		
			01	02	RUPAH MURNI	PLN	HLN	PNBP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	Jumlah dokumen hasil laporan monitoring, evaluasi dan data bidang tugas identifikasi potensi bencana, sistem dan prosedur, sarana prasarana, serta pencegahan dan penanggulangan bencana bahaya kebakaran	3 Dokumen			2,050,000					2,050,000	KL
5	Jumlah sarpras yang dialokasikan bagi pusat dan daerah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana serta bahaya kebakaran	21 sarpras			29,900,000					29,900,000	PB
6	Jumlah Daerah yang ditingkatkan kapasitas aparatnya dalam upaya penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran	20 Daerah			20,400,000					20,400,000	PB
7	Jumlah peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam upaya-upaya pengurangan resiko bencana dan Kebakaran	100 ormas kebencanaan			1,600,000					1,600,000	KL
8	Presentase implementasi penerapan SPM bidang pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan	20%			1,250,000					1,250,000	KL
9	Presentase penyelesaian urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat pencegahan dan penanggulangan bencana	100%			200,000					200,000	KL
1241	Kegiatan Pengembangan Dan Penataan Wilayah Administrasi Dan Perbatasan	Terfasilitasinya penataan wilayah administrasi, penegasan batas daerah, toponimi, pertanahan, pengembangan/ pengelolaan/ penyediaan sarpras perbatasan antar negara			81,600,000					81,600,000	
	1. Jumlah rumusan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan, dan toponimi	32 Rumusan			4,500,000					4,500,000	PB
	2. Presentase meningkatnya sinergitas hubungan instansi pusat dan pemerintahan daerah bidang tugas penataan wilayah administrasi dan perbatasan	70%			2,000,000					2,000,000	KL
	3. Presentase pembakuan rupabumi unsur buatan dan warisan budaya (toponimi)	50%			2,450,000					2,450,000	KL

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp X 1000)							KET (PN/PB/ KL)	
			OPERASIONAL		NON OPERASIONAL			TOTAL			
			01	02	RUPIAH MURNI	PLN	HLN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	Jumlah dokumen hasil laporan monitoring, evaluasi dan data bidang tugas penataan wilayah administrasi dan pegasan batas daerah, pengembangan wilayah perbatasan, dan toponimi	3 Dokumen			1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	KL
5	Prosentase penyelesaian urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat wilayah administrasi dan perbatasan	100%			200,000					200,000	KL
6	Jumlah segmen batas antar daerah yang ditegaskan	50 Segmen			10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	PB
7	Jumlah Sarana prasarana yang dialokasikan bagi daerah perbatasan antar negara dan pulau-pulau kecil terluar	21 Daerah			31,750,000	-	-	-	-	31,750,000	PN
8	Jumlah provinsi yang melaksanakan kerjasana perbatasan antar negara (JIM, SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG)	6 Provinsi			3,800,000	-	-	-	-	3,800,000	PN
9	Jumlah kesepakatan batas antar negara dalam rangka penyelesaian batas dan hubungan antar negara yang berbatasan	5 Kesepakatan			8,250,000	-	-	-	-	8,250,000	PB
10	Jumlah dokumen penyelesaian sengketa batas daerah/wilayah antar provinsi, kabupaten/kota	5 Dokumen			2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	KL
11	Jumlah Daerah yang difasilitasi dalam pegasan batas daerah dan pembakuan nama rupabumi	100%			15,650,000	-	-	-	-	15,650,000	KL
1242	Kegiatan Dukungan Manajemen Dan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum	Dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum	33,251,092	5,502,658	38,670,717	-	-	-	-	77,424,467	
1	Prosentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran (Renstra, Renja, RKP, RKA, RKAKL dan Petunjuk Operasional)	100%			3,400,000	-	-	-	-	3,400,000	KL
2	Prosentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi, laporan keuangan aset, laporan kinerja serta hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP	100%			5,250,000	-	-	-	-	5,250,000	KL

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp X 1000)										KET (PN/PB/ KL)
			OPERASIONAL		NON OPERASIONAL				PNBP	TOTAL			
			01	02	RUPIAH MURNI	PLN	HLN						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
3	Persentase pedoman/ juknis dan rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100%			4,700,000	-	-	-	4,700,000	KL			
4	Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan dan kepegawaian	100%			6,000,000				6,000,000	KL			
5	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana	100%			2,000,000	-	-	-	2,000,000	KL			
6	Persentase pengadaan dan sarana dan prasarana	85%			8,540,917	-	-	-	8,540,917	KL			
7	Persentase pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum di pusat dan daerah	100%			4,779,800	-	-	-	4,779,800	KL			
8	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	100%	33,251,092	5,502,658	-	-	-	-	38,753,750	KL			
9	Persentase kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan	86%			4,000,000	-	-	-	4,000,000	KL			

Keterangan:

PN : Prioritas Nasional

PB : Prioritas Bidang

KL : Prioritas Kementerian

KK : Kontrak Kinerja

MATRIKS RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
TAHUN ANGGARAN 2015  
(Berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran)

SATKER: DITJEN KEUANGAN DAERAH

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp X 1000)						KET (PN/PB/ KL)	
			OPERASIONAL		RUPIAH MURNI	NON OPERASIONAL				
			01	02		PLN	HLN	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi/pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah	23,363,401	4,314,978	71,252,147	-	-	-	98,930,526	
	1 Persentase Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi yang ditetapkan tepat waktu	100% APBD Provinsi								
	2 Persentase kenaikan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah provinsi setiap tahun	4 % pada prov, 3 % pada kab/kota								
	3 Persentase daerah yang menyerap DAK dalam APBD sesuai dengan petunjuk teknis	90%								
	4 Persentase Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi yang ditetapkan tepat waktu	100% Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov								
1274	Pembinaan Anggaran Daerah	Tersusunnya dan tersosialisasikannya kebijakan/regulasi di bidang anggaran daerah, serta tersedianya data dan informasi tentang Postur APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota	-	-	11,351,346	-	-	-	11,351,346	
	1 Jumlah Kebijakan/Regulasi/Pedoman di Bidang Anggaran Daerah	1 Permendagri, 1 Peraturan Pelaksanaan Lainnya			4,300,000				4,300,000	PB
	2 Persentase Peretapan APBD tepat waktu	100% APBD Provinsi 50% APBD Kab/Kota			3,901,346				3,901,346	PN
	3 Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat Anggaran Daerah	100%			900,000				900,000	KL
	4 Tersedianya data dan Informasi tentang postur APBD provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia	Tersedianya 1 (satu) dokumen data dan informasi postur APBD provinsi dan kabupaten/kota			2,250,000				2,250,000	KL
1275	Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah Dan Investasi Daerah	Tersusunnya kebijakan/regulasi di bidang pengelolaan pendapatan daerah dan investasi daerah yang diimplementasikan di daerah	-	-	12,476,919	-	-	-	12,476,919	
	1 Jumlah Kebijakan/Pedoman di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah yang diterapkan	3 Draft; 3 PMDN; 1 RPP BUMD; 1 Panduan			2,618,261				2,618,261	PB

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp. X.1000)							KET (PN/PB/ KL)
			OPERASIONAL			NON OPERASIONAL				
			01	02	03	RUPIAH MURNI	PLN	HLN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Jumlah daerah termasuk daerah tertinggal yang meningkat terkait Pendapatan Daerah dan investasi Daerah.	34 Provinsi, 40 Daerah Tertinggal			5,159,148				5,159,148	PB
3	Persentase kenaikan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah provinsi setiap tahun.	4 % pada prov, 3 % pada kab/kota			1,667,432				1,667,432	PN
4	Jumlah SKPD/unit kerja SKPD yang telah menerapkan PPK-BLUD	400 SKPD atau unit kerja SKPD			2,237,174				2,237,174	KL
5	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah.	100%			794,904				794,904	KL
1276	Kegiatan Pembinaan Dan Fasilitasi Dana Perimbangan	Tersusunnya kebijakan/regulasi di bidang Fasilitasi Dana Perimbangan dan Dana Transfer yang dapat diimplementasikan di daerah	-	-	9,378,018	-	-	-	9,378,018	
1	Jumlah Kebijakan/Pedoman di Bidang Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	2 Dokumen			900,000				900,000	PB
2	Persentase pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas dalam penyusunan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%			4,218,057				4,218,057	KL
3	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan	100%			900,000				900,000	KL
4	Persentase daerah yang menyerap DAK dalam APBD sesuai dengan petunjuk teknis	90%			1,000,000				1,000,000	PN
5	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%			2,359,961				2,359,961	KL
1277	Pembinaan Dan Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Tersusunnya kebijakan/regulasi di bidang Pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dapat diimplementasikan di daerah	-	-	16,355,271	-	-	-	16,355,271	
1	Persentase penetapan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu	100% Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov			6,050,000				6,050,000	PN
2	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	100%			850,000				850,000	KL

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp X 1000)							KET (PN/PB/ KL)	
			OPERASIONAL		NON OPERASIONAL			PNBP	TOTAL		
			01	02	RUPIAH MURNI	PLN	HLN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	Persentase pemerintah daerah yang menggunakan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah	80 % Pemda Provinsi dan Kab/kota seluruh Indonesia			2,000,000						KL
4	Persentase pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual	60 % Pemda Provinsi, 50% Pemda Kab/kota			7,455,271						PB
1278	Kegiatan Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Keuangan Daerah	Dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah	23,363,401	4,314,978	21,690,593	-	-	-	49,368,972		
1	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran	100%			2,029,250				2,029,250		KL
2	Persentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi, serta Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut LHP	100%			1,870,000				1,870,000		KL
3	Persentase Penyelesaian Laporan Keuangan yang sesuai Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Asset sesuai SIMAK BMN	100%			3,948,478				3,948,478		KL
4	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Dukungan Teknis Ditjen. Keuangan Daerah.	100%			9,510,919				9,510,919		KL
5	Persentase Penyelesaian Rancangan Program Legislasi dan Bahan Kebijakan Ditjen Keuangan Daerah	100%			1,495,980				1,495,980		KL
6	Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, serta Langganan Daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%	23,363,401	4,314,978					27,678,379		KL
7	Persentase Penyelesaian Dukungan Data Keuangan Daerah	100%			2,835,966				2,835,966		KL

Keterangan:

PN : Prioritas Nasional

PB : Prioritas Bidang

KL : Prioritas Kementerian

KK : Kontrak Kinerja







KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp. X 1000)							KET (PN/PB/ KL)
			OPERASIONAL		NON OPERASIONAL			PNBP	TOTAL	
			01	02	RUPIAH MURNI	PLN	HLN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	100%			300,000				300,000	KL
1271	3 Prosentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Pada Direktorat Kegiatan Penataan Pengembangan Kebijakan Kependudukan	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan cakupan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kebijakan kependudukan	-	-	10,500,000	-	-	-	10,500,000	
	1 Jumlah Kebijakan/Pedoman Pengembangan Kebijakan Kependudukan	9 Rekomendasi Pengembangan Kebijakan Kependudukan			4,700,000				4,700,000	KL
	2 Cakupan Pembinaan (Koordinasi, Bintek, Advokasi dan Sosialisasi) Pelaksanaan Kebijakan Perkembangan Kependudukan	10 Provinsi			3,017,700				3,017,700	KL
	3 Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Program, dan Dokumentasi Kebijakan Perkembangan Kependudukan	3 Laporan			2,482,300				2,482,300	KL
	4 Prosentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Pada Direktorat	100%			300,000				300,000	KL
1272	Kegiatan Penyerasian Kebijakan Dan Perencanaan Kependudukan	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dan cakupan fasilitasi pelaksanaan penyerasian kebijakan dan perencanaan kependudukan.	-	-	10,507,000	-	-	-	10,507,000	
	1 Jumlah kebijakan/Pedoman Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan	1 Pedoman/Juknis/Peraturan/Dokumen			250,000				250,000	KL
	2 Pembinaan (Bintek, Advokasi dan Sosialisasi) Pelaksanaan Proyeksi dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan	34 Kab/Kota			9,257,000				9,257,000	KL
	3 Jumlah Laporan Pelaksanaan Program, dan Dokumentasi Kebijakan Proyeksi dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan	2 Laporan			700,000				700,000	KL
	4 Prosentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Pada Direktorat	100%			300,000				300,000	KL
1273	Kegiatan Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dukungan pelayanan teknis dan administrasi yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	41,316,155	7,408,537	25,940,947	-	-	-	74,665,639	
	1 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	4 Jenis Dokumen			1,400,000				1,400,000	KL

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp X 1.000)							KET (PN/PB/ KL)	
			OPERASIONAL		NON OPERASIONAL						
			01	02	RUIAH MURNI	PLN	HLN	PNEP	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2 Dokumen/Pedoman/Juknis, Rancangan Peraturan Perundangan dan Surat Keputusan Lingkup Ditjen Dukung	2 Jenis Dokumen			2,149,947					2,149,947	KL
	3 Jumlah Laporan penyelesaian hasil monev dan laporan keuangan dan asset, laporan kinerja, serta hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP	14 Laporan			17,027,000					17,027,000	KL
	4 Jumlah Dokumen keuangan tahunan, dan laporan pengelolaan keuangan/kinerja keuangan serta Sistem Akuntansi Instansi (SAI) lingkup Ditjen Dukung	6 Jenis Dokumen, 12 Bulan			2,214,000					2,214,000	KL
	5 Presentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas lainnya	100%			2,200,000					2,200,000	KL

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp X 1.000)										KET (PN/PB/ KL)	
			OPERASIONAL					NON OPERASIONAL						
			01		02		RUPIAH MURNI	PLN		HLN		PNBP		TOTAL
			4	5	6	7		8	10					
1	2	3										11		
6	Prosentase pengadaan sarpras sesuai kebutuhan	100%			350,000					9	350,000	KL		
7	Prosentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta Langganan Daya dan Jasa) yang tepat waktu	100%	41,316,155	7,408,537							48,724,692	KL		
8	Prosentase Kesesuaian Capaian Kinerja dengan Rencana Kerja Tahunan	100%			600,000						600,000	KL		

Keterangan:

PN : Prioritas Nasional

PB : Prioritas Bidang

KL : Prioritas Kementerian

KK : Kontrak Kinerja



KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp X 1000)										KET (PN/PB/ KL)
			OPERASIONAL		NON OPERASIONAL						TOTAL		
			01	02	RUPIAH MURNI	PLN	HLN	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1232	Kegiatan Fasilitasi Politik Dalam Negeri	Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik	-	-	48,496,326	-	-	-	48,496,326				
	1 Jumlah peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang politik dalam negeri	1 PP dan 1 Permentdagri			4,600,000				4,600,000			PB	
	2 Jumlah peningkatan kapasitas ormas dan lembaga nirlaba lainnya dalam rangka pengembangan politik dalam negeri	100 ormas			5,000,000				5,000,000			PB	
	3 Jumlah Fasilitasi forum, diseminasi, Monev dan pendampingan Bidang politik dalam negeri	13 Forum			11,971,000				11,971,000			PB	
	4 Jumlah parpol yang mendapatkan Bantuan Keuangan dan peningkatan kapasitas	12 parpol			13,925,326				13,925,326			PB	
	5 Jumlah daerah yang menerapkan pelaksanaan best practise pendidikan politik	15 Provinsi			13,000,000				13,000,000			PB	
1233	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi	Terlaksananya penyusunan kebijakan, fasilitasi ketersediaan informasi dan dukungan pembinaan ketahanan ekonomi	-	-	20,000,000	-	-	-	20,000,000				
	1 Jumlah peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang Pembinaan dan Pengembangan ketahanan ekonomi	1 PMDN dan 1 modul			1,000,000				1,000,000			PB	
	2 Jumlah kerjasama dengan ormas, K/L/I (al UPT) dalam rangka Peningkatan Kapasitas Masyarakat bidang Ketahanan Ekonomi	100 ormas			5,000,000				5,000,000			PB	
	3 Jumlah Provinsi yang mendapat fasilitasi forum dan koordinasi dalam rangka Pembinaan Ketahanan Ekonomi dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya	8 Provinsi			11,550,000				11,550,000			PB	
	4 Prosentase daerah yang menyampaikan data dan informasi bidang ketahanan ekonomi melalui SIM	4 Dokumen			2,450,000				2,450,000			PB	
1234	Kegiatan Fasilitasi Kewaspadaan Nasional	Terlaksananya penyusunan kebijakan dan fasilitasi penanganan konflik	-	-	33,439,852	-	-	-	33,439,852				
	1 Jumlah peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang kewaspadaan nasional	1 PP			2,230,000				2,230,000			PB	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp X 1000)							KET (PN/PB/ KL)	
			OPERASIONAL		NON OPERASIONAL				TOTAL		
			01	02	RUPIAH MURNI	PLN	HLN	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2 Jumlah Penguatan dan pemberdayaan forum dialog kewaspadaan nasional (penanganan konflik dan penanganan gangguan kamdagri) seluruh Indonesia	34 Provinsi			6,150,000					6,150,000	PB
	3 Jumlah wilayah yang mendapatkan supervisi dalam penanganan konflik	8 wilayah pasca konflik (NAD, Kalteng,Sulteng, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, Jatim) 16 wilayah rawan konflik 10 wilayah potensi konflik			7,426,000					7,426,000	PB
	4 Jumlah Pemetaan, Pemantauan dan Pelaporan situasi Daerah secara efektif dan teratur di 34 Provinsi	34 Provinsi			1,330,000					1,330,000	PB
	5 Jumlah peningkatan kapasitas ormas dan lembaga nirlaba lainnya dalam rangka pemantapan kewaspadaan nasional	100 ormas			5,000,000					5,000,000	PB
	6 Jumlah Peningkatan kapasitas pemerintah daerah bidang kewaspadaan nasional dalam penanganan konflik	34 Provinsi			2,300,000					2,300,000	PB
	7 Jumlah daerah dalam peningkatan kinerja tim terpadu penanganan gangguan keamanan dalam negeri	34 Provinsi			6,700,000					6,700,000	PB
	8 Jumlah Peningkatan layanan publik khususnya administrasi, Lembaga Asing dan orang asing	150 Rekomendasi			2,303,852					2,303,852	PB
1235	Kegiatan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan			36,249,500					36,249,500	
	1 Jumlah pedoman dalam rangka penguatan karakter bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945	1 Modul			350,000					350,000	PB
	2 Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam rangka penguatan karakter bangsa	10 Prov			26,699,500					26,699,500	PB
	3 Jumlah peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam rangka penguatan karakter bangsa	7 Angkatan (5 Pembinaan dan 2 Nilai Sejarah Kebangsaan)			3,000,000					3,000,000	PB
	4 Jumlah rekomendasi penelitian bidang idpolkesbud dalam rangka kesatuan bangsa dan politik	150 Rekomendasi			1,200,000					1,200,000	PB
	5 Jumlah peningkatan kapasitas ormas dan lembaga nirlaba lainnya dalam rangka peningkatan ideologi dan Wasbang Elemen Masyarakat	100 Ormas			5,000,000					5,000,000	PB

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp X 1000)										KET (PN/PB/ KL)
			OPERASIONAL		NON OPERASIONAL				TOTAL				
			01	02	RUPIAH MURNI	PLN	HLN	9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1236	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik	Dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Ditjen Kesbangpol	29,297,270	5,183,220	20,379,567	-	-	-	54,860,057				
	1 Jumlah Dokumen perencanaan, data dan informasi serta konsistensi pelaporan kinerja yang diselesaikan secara akuntabel dan tepat waktu	16 Dokumen			9,541,808				9,541,808	KL			
	2 Jumlah dokumen keuangan tahunan, dan laporan pengelolaan keuangan/kinerja keuangan sesuai Sistem Akuntasi Instansi (SAI) lingkup Ditjen Kesbangpol	18 dokumen			2,730,000				2,730,000	KL			
	3 Jumlah dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi, penataan urusan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	10 dokumen			4,441,137				4,441,137	KL			
	4 Jumlah Penyelesaian Operasional kerumahaan, perlengkapan dan Ketausahaan Lingkup Ditjen Kesbangpol	3 dokumen			2,312,797				2,312,797	KL			
	5 Persentase Penyelesaian pelayanan dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta langganan daya & Jasa) yang tepat waktu	100%	29,297,270	5,183,220					34,480,490	KL			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp X 1000)							KET (PN/PB/ KL)
			OPERASIONAL		RUPIAH MURNI	NON OPERASIONAL			TOTAL	
			01	02		PLN	HLN			
1	2 6 Jumlah Pengadaan sarana &/Prasarana non mengikat	3 63 Unit	4	5	6 1,353,825	7	8	9	10 1,353,825	11 KL

Keterangan:

PN : Prioritas Nasional

PB : Prioritas Bidang

KL : Prioritas Kementerian

KK : Kontrak Kinerja

RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
TAHUN ANGGARAN 2015  
(BERDASARKAN PAGU ALOKASI ANGGARAN)

SATKER: INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp X 1000)										KET (PN/PE/ KL)
			OPERASIONAL		NON OPERASIONAL					TOTAL			
			01	02	RUPIAH MURNI	PLN	HLN	PNBP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
12	PROGRAM PENDIDIKAN KEPAMONGPRAJAJAN	Tersedianya kader aparatur pemerintahan dalam negeri yang profesional dan berkualitas pada derajat program vokasi, akademik dan profesi	431,374,473	431,374,473	198,556,039	-	-	13,626,481	642,666,105	11			
1	1 Persentase jumlah lulusan pendidikan kader program vokasi, akademik dan profesi kepomongprajajan dengan predikat "Dengan Pujian" dan atau "Cum Laude"	7% dari jumlah praja/ Mahasiswa											
2	2 Persentase peningkatan rata rata nilai pendidikan (pengajaran, pelatihan dan pengasuhan ) Program Vokasi, Akademik dan Profesi Kepomongprajajan	Naik 2,5% (0,1 dari skala 4) Nilai rata-rata $\geq 2$											
3	3 Peningkatan jumlah dosen bersertifikat	50% dosen IPDN											
4	4 Persentase hasil kajian dan penelitian untuk pengembangan akademik	100%											
5	5 Persentase Cakupan Pengabdian kepada masyarakat	100% (15 desa binaan)											
6	6 Persentase tingkat Kepuasan Stakeholder terhadap Alumni IPDN dan kegiatan ekstrakurikuler praja yang berprestasi	100% (4 Provinsi), 65% (4 Kegiatan Ekstrakurikuler)											
1292	Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi, Akademik, Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan Kepomongprajajan	Pelayanan Administrasi Akademik yang berkualitas, Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan Pelatihan serta Administrasi Kerjasama	-	-	55,611,122	-	-	13,181,080	68,792,202				
1	1 Jumlah Pedoman Akademik serta Pengembangan Bahan Pengajaran Sesuai Kurikulum	3 Jenis Bahan Ajar (30 Literatur, 144 GBPP /SAP/ SYLABUS, 62 Modul)	-	-	3,449,957	-	-	92,403	3,542,360	KL			
2	2 Jumlah pedoman akademik dan evaluasi pendidikan	4 Pedoman Akademik, 6 Dokumen Evaluasi Pendidikan	-	-	3,046,232	-	-	1,069,644	4,115,876	KL			
3	3 Persentase pelayanan Kegiatan Pengajaran Program Vokasi, akademik dan Profesi	100% (Terlaksananya pelayanan Kegiatan Pengajaran Program Vokasi, akademik dan Profesi)	-	-	4,740,793	-	-	10,842,807	15,583,600	KL			
4	4 Cakupan Pengembangan SDM tenaga Pendidik dan Kepondidikan	120 Tenaga Pendidik dan Kepondidikan	-	-	2,372,616	-	-	431,230	2,803,846	KL			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp X 1000)										KET (PN/PB/ KL)
			OPERASIONAL		NON OPERASIONAL						TOTAL		
			01	02	RUPIAH MURNI	PLN	HLN	PNBP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
5	Persentase Hasil Kejian dan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk Pengembangan Akademik	100%			12,787,973			558,717	13,346,690	KL			
6	Jumlah Rekomendasi Hasil Penyelenggaraan Kegiatan Senat	2 rekomendasi Senat Institut, 2 Rekomendasi Senat Fakultas			1,147,986				1,147,986	KL			
7	Persentase Kepuasan Pengguna Perpustakaan	100%			1,548,868				1,548,868	KL			
8	Persentase ketersediaan Media Informasi secara Elektronik yang digunakan unit kerja Lingkup IPDN	100%			861,973				861,973	KL			
9	Persentase Peningkatan Mutu/akreditasi Kegiatan dan Pelayanan Pendidikan	Terstandarisasinya Penyelenggaraan Kegiatan dan Pelayanan Pendidikan			896,238			25,885	922,123	KL			
10	Jumlah Jurnal Pendidikan yang terakreditasi	2 Jurnal terakreditasi, 5 Jurnal Prodi, dan 5 Jurnal S1, 2 Jurnal Fakultas, 1 Jurnal Internasional, 1 Jurnal Program Magister			1,099,194			160,394	1,259,588	KL			
11	Jumlah pelayanan Kegiatan Pelatihan Praja	100% (Terlaksananya pelayanan Kegiatan Pelatihan Program Vokasi dan S1)			17,923,190				17,923,190	KL			
12	Jumlah Kerjasama dengan Lembaga /Pemerintah Daerah, Pendidikan Tinggi di Dalam dan Luar Negeri	22 Dokumen Kerjasama ( MOU)			2,803,749				2,803,749	KL			
13	Konsistensi perencanaan dan Penganggaran serta Pelaksanaan Program dan Kegiatan	100%			2,932,353				2,932,353	KL			
1293	Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keprajanaan dan Kemahasiswaan	Pelayanan administrasi keprajanaan dan kemahasiswaan tepat waktu			35,180,013				35,180,013				
1	Persentase ketepatan waktu penanganan Urusan Administrasi Praja /Mahasiswa	100%			21,918,500				21,918,500	KL			
2	Persentase tingkat Kepuasan Stakeholder terhadap Alumni IPDN	100%			397,272				397,272	KL			
3	Persentase penurunan pelanggaran kedisiplinan praaja pada IPDN	5% Pelanggaran Berat			9,315,866				9,315,866	KL			
4	Peningkatan Persentase Prestasi Praja dari Kegiatan Ekskurikuler	65%			3,548,375				3,548,375	KL			
1294	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan Pendidikan Kepamongpraajaan	Dukungan pelayanan administrasi dan teknis yang berkualitas	127,119,547	133,246,323	66,592,600			445,401	327,403,871				

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp X 1000)										KET (PN/PB/ KL)
			OPERASIONAL		NON OPERASIONAL						TOTAL		
			01	02	RUPIAH MURNI	PLN	HLN	PNBP					
									04	05			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	1 Persentase penyelesaian Pelayanan Dukung Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta Anggaran Daya dan Jasa)	100% (Pelayanan Operasional Kerja)	127,119,547	133,246,323	-	-	-	-	260,365,870	KL			
	2 Persentase pelayanan, pengelolaan, dan pelaporan Administrasi Kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan dan keuangan	100%	-	-	13,085,600	-	-	-	13,085,600	KL			
	3 Tingkat Kepuasan Civitas Akademika atas pelayanan Unit penunjang administrasi umum dan keuangan	100%	-	-	6,450,000	-	-	89,001	6,539,001	KL			
	4 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan kedinmasan Lingkup IPDN	100%	-	-	47,057,000	-	-	356,400	47,413,400	KL			
1295	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongrajaan di Daerah	Terselenggaranya Pendidikan Kepamongrajaan Kampus IPDN di Daerah (Kampus Sulawesi Utara, Kampus Sulawesi Selatan, Kampus Riau, Kampus Sumatera Barat, Kampus Kalimantan Barat, Kampus Nusa Tenggara Barat, Kampus Papua)	32,719,244	138,289,359	40,281,416	-	-	-	211,290,019				
	1 Prosentase penyelesaian Pelayanan Dukung Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta Anggaran Daya dan Jasa)	100% (Pelayanan Operasional Kerja pada IPDN Kampus Daerah Sulut, IPDN Kampus Daerah Sulsel, IPDN Kampus Daerah Riau, IPDN Kampus Daerah Sumbang, IPDN Kampus Daerah Kalbar, IPDN Kampus Daerah NTB, IPDN Kampus Daerah Papua)	32,719,244	138,289,359	-	-	-	-	171,008,603	KL			
	2 Persentase pelayanan, pengelolaan, dan pelaporan Administrasi Kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan dan keuangan	100% (Pelayanan, pengelolaan, dan pelaporan Administrasi Kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan dan keuangan pada IPDN Kampus Daerah Sulut, IPDN Kampus Daerah Sulsel, IPDN Kampus Daerah Riau, IPDN Kampus Daerah Sumbang, IPDN Kampus Daerah Kalbar, IPDN Kampus Daerah NTB, IPDN Kampus Daerah Papua)	-	-	4,741,841	-	-	-	4,741,841	KL			
	3 Tingkat Kepuasan Civitas Akademika atas pelayanan unit penunjang penyelenggaraan pendidikan kepamongrajaan di daerah	100% (Pelayanan unit penunjang penyelenggaraan pendidikan pada IPDN Kampus Daerah Sulut, IPDN Kampus Daerah Sulsel, IPDN Kampus Daerah Riau, IPDN Kampus Daerah Sumbang, IPDN Kampus Daerah Kalbar, IPDN Kampus Daerah NTB, IPDN Kampus Daerah Papua)	-	-	1,182,134	-	-	-	1,182,134	KL			



KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp X 1000)										KET (PN/PB/ KL)
			OPERASIONAL		NON OPERASIONAL						TOTAL		
			01	02	RUPIAH MURNI	PLN	HLN	PNBP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	KL		
	11 Persentase penurunan pelanggaran kedisiplinan praja pada IPDN Kampus daerah	5% Pelanggaran Berat (IPDN Kampus Daerah Sultut, IPDN Kampus Daerah Sulsel, IPDN Kampus Daerah Riau, IPDN Kampus Daerah Sumbang, IPDN Kampus Daerah Kalbar, IPDN Kampus Daerah NTB, IPDN Kampus Daerah Papua)			2,827,486								
	12 Persentase kegiatan ekstrakurikuler praja yang berprestasi pada IPDN Kampus daerah Papua	65% (IPDN Kampus Daerah Sultut, IPDN Kampus Daerah Riau, IPDN Kampus Daerah Sumbang, IPDN Kampus Daerah Kalbar, IPDN Kampus Daerah NTB, IPDN Kampus Daerah Papua)			2,020,594								

Keterangan:

PN : Prioritas Nasional

PB : Prioritas Bidang

KL : Prioritas Kementerian

KK : Kontrak Kinerja



KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp X 1000)							KET (PN/PB/ KL)
			OPERASIONAL			NON OPERASIONAL				
			01	02	05	RUPIAH MURNI	PLN	HLN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1243	Kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Dan Desa Lingkup Regional	Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam memfasilitasi proses pengelolaan pembangunan yang partisipatif dan demokratis	11,156,263	8,239,185	46,237,663	-	-	-	65,633,111	
	1 Jumlah kumulatif pelatihan di bidang pemberdayaan aparatur desa/kelurahan sesuai standar	75			13,858,294				13,858,294	PB
	2 Jumlah kumulatif pelatihan di bidang pemberdayaan lembaga masyarakat desa/kelurahan sesuai standar	123 Angkatan			19,347,863				19,347,863	PB
	3. Prosentase Biaya rata-rata pelayanan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, administrasi umum, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, termasuk pembayaran gaji pegawai	100%	11,156,263	8,239,185	13,031,506				32,426,954	PB
1244	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Dan Pelatihan Masyarakat	Meningkatkannya Perencanaan Partisipatif, Pendataan Potensi Masyarakat, Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat	-	-	85,074,200	-	-	-	85,074,200	
	1. Peningkatan Kualitas Pelatihan Pelatih Masyarakat	5 dokumen, 20 angkatan, 750 orang, 34 provinsi			13,014,500				13,014,500	PB
	2. Penataan dan Kerjasama Lembaga Kemasyarakatan	2 dokumen, 34 provinsi, 6 desa & 6 kelurahan			11,775,000				11,775,000	PB
	3. Pemutakhiran dan Identifikasi Tahapan Perkembangan Desa berdasarkan Data Profil Desa dan Kelurahan	72.000 desa (kumulatif)			42,312,300				42,312,300	PB
	4 Peningkatan Pelaksanaan Sistem Perencanaan Partisipatif	33 Provinsi 80 Kabupaten			3,098,700				3,098,700	PB
	5. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dalam Penataan Ruang dan Pengembangan Kawasan Perdesaan	1 dokumen, 26 kab, 50 desa			14,873,700				14,873,700	PB

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp X 1000)										KET (PW/PB/ KL)		
			OPERASIONAL				NON OPERASIONAL							PNBP	TOTAL
			01	02	05	04	RUPIAH MURNI	PLN	HLN	7	8	10			
1245	2 Kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM MP)	3 Pelayanan percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan di kecamatan dan desa (PNPM Perdesaan) melalui Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sesuai standar	-	-	5	4	888,881,518	525,000,000	-	-	9	1,413,881,518	11		
	1. Fasilitasi Pembinaan/Pengendalian/Pelak sanaan PNPM Mandiri					149,877,752	159,356,569	-	-	-	-	309,234,321	PN		
	2. Cakupan Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) di Kawasan Perdesaan					33,321,784	-	-	-	-	-	33,321,784	PN		
	3. Dekonsentrasi	33 Salter				705,681,982	365,643,431	-	-	-	-	1,071,325,413	PN		
1246	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat Dan Sosial Budaya Masyarakat	Pelayanan pengembangan pemberdayaan adat dan sosial masyarakat sesuai standar	-	-	-	291,891,766	-	500,000,000	-	-	-	791,891,766			
	1. Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dalam Mengakses Layanan Kesehatan dan Pendidikan (PNPM Generasi)	11 provinsi, 64 kabupaten, 499 kecamatan				216,700,000	-	500,000,000	-	-	-	716,700,000	PB		
	2 Peningkatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) termasuk Penguatan Kelembagaan Posyandu dalam Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat	468 Kab/kota di 34 Provinsi				25,527,158	-	-	-	-	-	25,527,158	PB		
	3 Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat	20 Kab/Kota				14,081,115	-	-	-	-	-	14,081,115	PB		
	4 Terfasilitasinya Daerah dalam peningkatan kapasitas dan keberdayaan tenaga kerja perdesaan	33 Provinsi 50 Kabupaten				14,389,143	-	-	-	-	-	14,389,143	PB		
	5 Peningkatan kualitas pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan di daerah)	25 Provinsi 50 Kabupaten				9,369,834	-	-	-	-	-	9,369,834	PB		
	6 Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dan penanganan masalah sosial (HIV/AIDS, LANSIA, Disabilitas, Pendidikan dan Kesehatan)	34 Prov/412 Kab/93 Kota dan 34 Komda LANSIA Prov/200 Komda LANSIA Kab/34 Komda LANSIA Kota				11,824,516	-	-	-	-	-	11,824,516	PB		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp X 1000)						KET (PN/PB/KL)		
			OPERASIONAL			NON OPERASIONAL					
			01	02	03	04	05	06			
			01	02	03	04	05	06	PNBP	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1247	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan	Mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis dan efektif dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat			562,049,449		10,300,000			572,349,449	
	1 Jumlah Rumusan Kebijakan Terkait Pemerintahan Desa Dan Kelurahan.	17 Dokumen 1 Laporan			18,236,400					18,236,400	PB
	2 Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa	32 provinsi 96 kab/kota 600 aparat BPD, 4 laporan			10,381,900					10,381,900	PB
	3 Peningkatan kapasitas pemerintah desa	33 provinsi ,100 kab/kota, 99 desa, 10 laporan, 1 sekretariat, 2 dokumen			516,234,649		10,300,000			526,534,649	PB
	4 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Target 8 dokumen,33 provinsi, 442 kab/kota			9,060,100					9,060,100	PB
	5 Jumlah Rekomendasi Penataan desa dan kelurahan	33 provinsi, 399 kab, 98 kota, 3 laporan, 1 dokumen database			8,136,400					8,136,400	PB
1248	Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Teknologi Tepat Guna	Pelayanan pengelolaan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna perdesaan sesuai standar			75,212,766		35,000,000			110,212,766	
	1 Pemfaatan, pengembangan, pemasyarakatan dan kerjasama teknologi perdesaan	Target 6 UMK, 40 Posyantek, 34 provinsi 82 kabupaten			25,352,994					25,352,994	PB
	2 Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Pedesaan	10 prov, 70 kab/kota			22,030,250					22,030,250	PB
	3 Penguatan Kelembagaan Pengelola dan Peningkatan Pelayanan Sarpras Perbukitan Perdesaan yg berkelanjutan	497 kab/kota: 1. PAMSIMAS 32 provinsi 220 kab/kota 2. AMPL 34 provinsi 497 kab/kota 3. Sarpras Perkim 30 provinsi 150 kab/kota			19,627,078		35,000,000			54,627,078	PB
	4 Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan desa dalam pemanfaatan sumber daya lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS), pesisir dan pulau-pulau kecil dan terbuar secara terpadu berbasis masyarakat	30 provinsi 60 kab 10 desa			8,202,444					8,202,444	PB
1249	Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi	Pelayanan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Sesuai Standar			78,433,400		5,300,000			83,733,400	
	1 Pengembangan usaha ekonomi perdesaan	34 Prov (pusat) 33 Provinsi (DK)			23,683,700		5,300,000			28,983,700	PB

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp. X 1000)							KET (PN/PB/ KL)
			OPERASIONAL		NON OPERASIONAL					
			01	02	RUPIAH MURNI	PLN	HLN	PNEP	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 Pengembangan usaha ekonomi keluarga	50 Kabupaten			10,980,700				10,980,700	PB
	3 Penataan dan Penguatan BUMDesa	33 Prov 82 Kab 164 Desa			17,234,546				17,234,546	PB
	4 Pengembangan kapasitas produksi dan pemasaran (hasil usaha ekonomi masyarakat) dalam mendukung peningkatan pembangunan ekonomi pedesaan	89 Kab			15,676,154				15,676,154	PB
	5 Peningkatan dan pengembangan cadangan pangan pemerintah desa (CPPD)	60 kabupaten			10,858,300				10,858,300	PB
1250	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PMD	Dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di Lingkungan Ditjen PMD	37,203,831	13,475,941	359,030,364	-	-	-	409,710,136	
	1 Presentase Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran yang Direncanakan	100% (7 Dok)			125,403,205				125,403,205	KL
	2 Jumlah Laporan Keuangan Dalam Memenuhi Kebutuhan Administrasi dan Keuangan Serta Laporan Keuangan yang Sesuai Dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	7 Dokumen			15,000,000				15,000,000	KL
	3 Presentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Sekretariat Ditjen PMD	100%			18,957,650				18,957,650	KL
	4 Presentase Pengadaan Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan	4 Unit UPT Baru, 1 Unit Balai Lampung			125,000,000				125,000,000	KL
	5 Presentase Data Aset Barang Milik Negara (BMN) Sesuai Dengan Standar	100% (1 Dok)			7,695,187				7,695,187	KL
	6 Presentase Pembinaan Kepegawaian	100%			6,000,000				6,000,000	KL
	7 Presentase penyelesaian peraturan perundang-undangan sesuai standar	5 Dokumen			13,500,000				13,500,000	KL

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	OUTCOME/OUTPUT/TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp X 1000)										KET (PN/PB/ KL)
			OPERASIONAL					NON OPERASIONAL					
			01	02	05	04	06	07	08	09	10	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
8	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan dipusat dan daerah sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT)	6 Laporan			39,974,322							39,974,322	KL
9	Prosentase penyelesaian Standar Pelayanan	100%			7,500,000							7,500,000	KL
10	Prosentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, serta Langganan Daya dan Jasa) yang Tepat Waktu	100%	37,203,831	13,475,941	-							50,679,772	KL

Keterangan:

PN : Prioritas Nasional

PB : Prioritas Bidang

KL : Prioritas Kementerian

KK : Kontrak Kinerja

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO